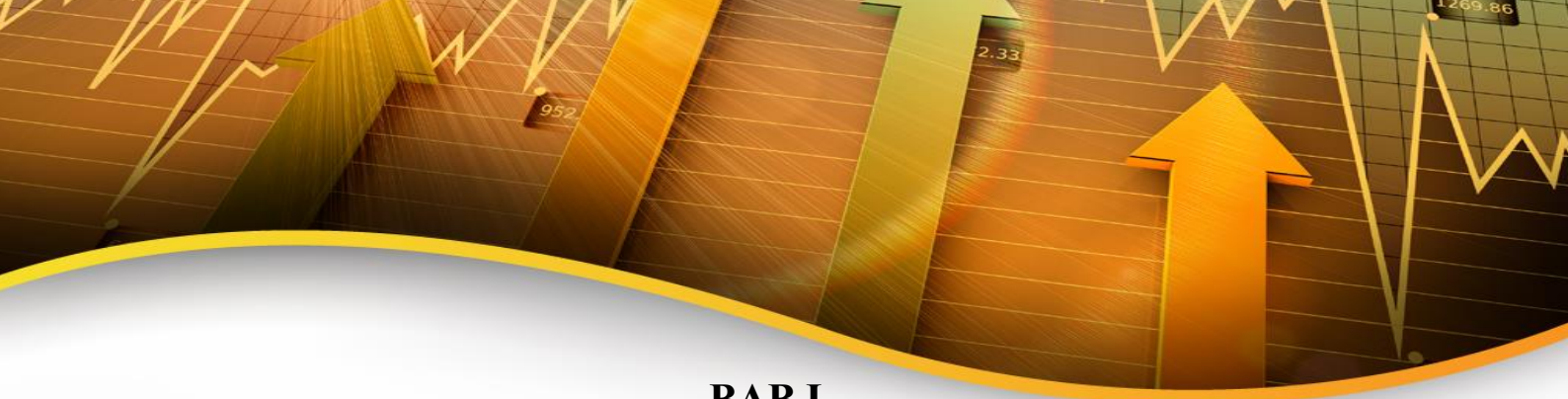




LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan beserta indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan rencana kinerja akan memudahkan dalam mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun dengan melakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja utama.

2. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkanintegritas, akuntabilitas, tranparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasidan sebagai dasar penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi Amanah Sebagai dasar dalam penetapan **Sasaran Kinerja Pegawai**.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,21	1,25	Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,05	12			
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	100	3			

BAB III

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,19	1,25	$\frac{\text{Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,16	12	$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	100	3	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$

B. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	Uraian	Alokasi		Keterangan
1)	APBD			
	a) Belanja (Program)	Rp.	11,916,840,760 ,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	9,738,519,860 ,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	24.999.700 ,-	Realisasi minimal 90%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	876,822,200 ,-	Realisasi minimal 90%
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	1.000.000.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	276.499.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	b) Pendapatan	Rp.	1.500.000.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp.	13.416.840.760 ,-	
2)	APBN			
	Program	Rp.	2,556,760,000 ,-	Realisasi minimal 90%
	1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	1.373.700.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	2. Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	468.329.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	3. Perdagangan Luar Negeri	Rp.	714.731.000 ,-	Realisasi minimal 90%

C. Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 28 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);

- F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90);**
- G. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;**
- H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :**
 - 1. TL temuan tahun 2022: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL temuan dibawah tahun 2022: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- I. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis dan yang diusul pada pelaksanaan kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/LSM minimal 2 (dua);**
- J. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;**
- K. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- L. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Infromatif;**
- M. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.**

Pencapaian Perjanjian Kinerja pada Triwulan II sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	Triwulan II Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,19	1,25	1,32	100 %
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,16	12	12,69	100 %
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	100	3	49,79	100 %
R A T A – R A T A C A P A I A N							100 %

✓ Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB :

Tabel 3.1 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		Triwulan II 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.751.773,51
2	Pertambangan dan Penggalian	329.470,87
3	Industri Pengolahan	426.227,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	29.603,60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.714,52
6	Konstruksi	3.058.568,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.096.876,58
8	Transportasi dan Pergudangan	1.650.433,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	216.137,29
10	Informasi dan Komunikasi	2.230.055,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.389.580,35
12	Real Estate	749.945,71
13	Jasa Perusahaan	47.805,22

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		Triwulan II 2023
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.115.092,56
15	Jasa Pendidikan	2.811.543,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	818.758,48
17	Jasa lainnya	534.361,13
	Total PDRB	32.273.948,74

Sumber Data: PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 426.227,59 Juta atau sebesar 1,32 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 32.273.948,74 Juta sehingga realisasi telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,25 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke satu, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen.

- ✓ Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB :

Tabel 3.2 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		Triwulan II 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.751.773,51
2	Pertambangan dan Penggalian	329.470,87
3	Industri Pengolahan	426.227,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	29.603,60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.714,52
6	Konstruksi	3.058.568,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.096.876,58
8	Transportasi dan Pergudangan	1.650.433,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	216.137,29
10	Informasi dan Komunikasi	2.230.055,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.389.580,35
12	Real Estate	749.945,71
13	Jasa Perusahaan	47.805,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.115.092,56
15	Jasa Pendidikan	2.811.543,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	818.758,48
17	Jasa lainnya	534.361,13
	Total PDRB	32.273.948,74

Sumber Data: PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.096.876,58 Juta atau sebesar 12,69 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 32.273.948,74 Juta sehingga realisasi telah melebihi target yang ditetapkan sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke dua, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen.

✓ Persentase peningkatan nilai ekspor :

Nilai Ekspor Nonmigas Triwulan II Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Nilai Ekspor non migas (US \$) Triwulan II Tahun 2022 dan 2023

No	Triwulan II Tahun (n)	Nilai Ekspor nonmigas (US \$)
1.	2022	8.721.518
2.	2023	13.063.545

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Ada peningkatan nilai ekspor non migas dari Triwulan II Tahun 2022 terhadap Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar US\$ 4.342.027 atau sebesar 49,79 persen, sehingga realisasi jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 3 persen, sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja ke satu, maka persentase capaiannya tetap dihitung sebesar 100 persen.

2. Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi terhadap Capaian Kinerja

⇒ Faktor Pendukung :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berusaha dalam meningkatkan kinerja antara lain:

- Ketersediaan sumber daya baik alam maupun tenaga kerja potensial;
- Kerja sama dan kolaborasi dengan dinas/unit teknis terkait untuk mengalokasikan dan menganggarkan program/kegiatan;
- Pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 yang sempat menghambat pertumbuhan ekspor di Tahun 2021.

⇒ Faktor Penghambat :

- Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi

dan diversifikasi produk;

- b. Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Solusi/Rekomendasi :

- a. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis baik bagi tenaga industri dan perdagangan maupun pelaku usaha.
- b. Fasilitasi pengembangan akses pasar dengan memanfaatkan berbagai jenis platform penjualan baik secara online maupun offline.
- c. Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir.

3. Realisasi Keuangan (Kondisi April s/d Juni 2023)

- a. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Triwulan II APBD TA 2023 :

No	Program	Pagu (Rp)	Triwulan II	
			Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.745.855.400 ,-	2.385.346.420 ,-	24,48
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700 ,-	6.000.000 ,-	1,14
3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	876.822.200 ,-	58.846.080 ,-	6,71
4.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.000.000.000 ,-	0 ,-	0
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	306.624.000 ,-	0 ,-	0
	Total :	12.454.301.300 ,-	2.450.192.500 ,-	19,67

b. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Triwulan II APBN TA 2023 :

No	Program	Pagu (Rp.)	Reliasasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.373.700.000 ,-	364.941.600 ,-	26,57
2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	468.329.000 ,-	96.232.000 ,-	20,55
3	Perdagangan Luar Negeri	714.731.000 ,-	40.610.000 ,-	5,68
	Total	2.556.760.000 ,-	501.783.600 ,-	19,63

c. Realisasi Pendapatan Triwulan II TA 2023 :

No	Program	Pagu (Rp.)	Reliasasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan	1.500.000.000 ,-	11.900.000 ,-	0,79

Kupang, Juli 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Ec/M. Nur Abdullah, MM
PENYAHUTama Muda (IV/c)
NIP/19631016 199203 1 005